

## **Peningkatan Pemahaman Tentang Wawasan Nusantara (Geopolitik) Bagi Generasi Muda Di Wilayah Perbatasan Sebagai Bagian Dari Bela Negara**

**Dewi Nurvianti<sup>1</sup>, Fathurrahman<sup>2</sup>, Nurzamzam<sup>3</sup> Arvita Oktaviana<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Indonesia

email: [dewi.intjenuru.dn@gmail.com](mailto:dewi.intjenuru.dn@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Borneo Tarakan

email: [rahmanfathur466@gmail.com](mailto:rahmanfathur466@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Borneo Tarakan.

email: [zamzam.law@gmail.com](mailto:zamzam.law@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Borneo Tarakan.

email: [arvitaoktavianaanaa@gmail.com](mailto:arvitaoktavianaanaa@gmail.com)

### ***Abstract***

*This Community Service appointed the title is Increasing Young Generation's Understanding of Archipelagic Insight Concept (Geopolitics) as Part of Defending the Country. The project used counseling method, it held at Senior High School namely SMAN 2 Tarakan as well as this project's partner. The program was implemented, bearing in mind that defending the country is obligation of every citizen. In a broader sense, it includes having lawful outlook towards nation and state. The conclusion after the counseling is younger generation especially students at high school in Border Region, must have a comprehensive understanding of defending the country, including understanding condition of country or must have proper perspective regarding the existence of younger generation in realizing aspirations of nation. Aftermost, the suggestion from organizer of the community service is required for continuous counseling or workshop with the output of understanding the Archipelago insight in every school involved all stakeholders.*

***Keywords: Archipelagic Insights, Younger Generation, Border Area***

### **Abstrak**

*Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) kali ini mengangkat judul Peningkatan Pemahaman Generasi Muda Terhadap Konsepsi Wawasan Nusantara Sebagai Bagian Dari Bela Negara. Metode yang digunakan dalam proses peningkatan pemahaman generasi muda adalah penyuluhan yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tarakan yang ditunjuk sebagai mitra, dimana workshop narasumber kegiatan menghadirkan akademisi (dosen) yang ahli di bidang Wawasan Nusantara. Program ini dilaksanakan, mengingat bela negara merupakan kewajiban*

*setiap warga negara. Bela negara dalam artian yang lebih luas termasuk memiliki cara pandang yang benar terhadap bangsa dan negara. Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah generasi muda, khususnya pelajar di tingkat SMA di Wilayah Perbatasan harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai bela negara termasuk di dalamnya memahami kondisi negara atau harus memiliki cara pandang yang tepat mengenai keberadaan generasi muda dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Saran dari tim pelaksana PKM adalah perlunya workshop rutin dengan luaran pemahaman tentang wawasan Nusantara di setiap sekolah yang melibatkan seluruh stakeholders.*

**Kata Kunci:** Wawasan Nusantara, Generasi Muda, Wilayah Perbatasan

## **A. Pendahuluan**

Fakta bahwa Kondisi kawasan perbatasan Indonesia yang memprihatinkan, jelas terlihat bila dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga. Demikian pula di Kalimantan Utara, persoalan ekonomi juga menjadi aspek utama yang masih perlu diupayakan dapat dinikmati oleh masyarakat perbatasan. Beberapa masyarakat di perbatasan Kalimantan utara memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai Warga Negara Indonesia, dan memiliki Identity Card (IC) sebagai tanda kependudukan warga Negara Malaysia. Alasan mereka melakukan hal tersebut adalah kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan di Negara tetangga. Selain itu kondisi fasilitas kesehatan juga masih sangat tertinggal, sehingga keberadaan IC tersebut juga ditujukan untuk perolehan kemudahan fasilitas kesehatan di Negara tetangga. Bisa dibayangkan, jika kondisi ini tidak segera diakhiri, mengerusnya nilai cinta terhadap tanah air akan semakin memprihatinkan khususnya bagi generasi muda di wilayah perbatasan.

Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan yang demikian akan melahirkan skeptisme di diri masyarakat khususnya generasi muda mengenai kehadiran negara di wilayah nya. Pemahaman masyarakat perbatasan mengenai wilayahnya akan menghasilkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam

bernegara. Hal ini sangat penting, mengingat pemahaman terhadap hak dan kewajiban merupakan prasyarat terjalannya kehidupan yang disiplin, taat hukum, dan saling menghargai. Kehidupan yang seperti ini harus diupayakan oleh semua pihak, khususnya bagi generasi muda di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.

Generasi muda memiliki peran penting dalam berbangsa dan bernegara, peran tersebut bisa menjadi kekuatan namun dapat pula menjadi kelemahan bangsa jika tidak diakomodir keberadaanya, sehingga penting untuk memberikan pemahaman dimulai dari bagaimana generasi muda melihat bangsa dan negara nya. Demikian pula generasi muda di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, berkewajiban melakukan bela negara sebagaimana yang diamanahkan oleh Konstitusi 1945 demi tercapainya tujuan nasional.

Amanah konstitusi terkait kewajiban bela negara juga harus diupayakan oleh institusi pendidikan tinggi. Universitas Borneo Tarakan sebagai satu-satunya institusi Pendidikan tinggi negeri di Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan wilayah perbatasan dengan negara Malaysia, sejak berdiri telah berkomitmen untuk mengambil peran dalam pengembangan Kawasan perbatasan. Hal ini dibuktikan dengan visi dan misi UBT yakni melakukan pengembangan Kawasan perbatasan termasuk pengembangan sumber daya manusia di wilayah perbatasan. Sejalan dengan hal tersebut, fakultas dalam lingkup UBT juga mendukung dan melaksanakan visi dan misi institusi. FH UBT melalui tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa mengambil peran dalam rangka bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi sebagaimana amanat dalam konstitusi 1945.

Kondisi yang demikianlah yang menjadi latar belakang mengapa peningkatan pemahaman bagi generasi muda di Kalimantan Utara tentang

wawasan nusantara sangat penting untuk dilaksanakan. Tim PPM kali ini mencoba menggagas kegiatan tersebut melalui workshop pada sekolah menengah dimana para generasi muda mengenyam pendidikan, bersama mitra Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Tarakan. Hasil kegiatan akan dipublikasikan melalui jurnal pengabdian dan media massa sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan.

## **B. Metode Pelaksanaan**

### **1. Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran dalam pengabdian adalah kegiatan ini adalah siswa SMA Negeri 2 Tarakan.

### **2. Metode Kegiatan**

Metode yang digunakan dalam program pengabdian masyarakat berupa pelaksanaan workshop bagi generasi muda. Adapun tema yang digagas dalam kegiatan ini jpemahaman geopolitik bagi siswa SMA sebagai generasi muda bangsa sebagai bagian dari bela negara. Hasil kegiatan akan didokumentasikan dalam tulisan dan dipublikasikan.

### **3. Langkah-langkah Kegiatan**

Adapun Langkah-langkah yang akan dilaksanakan sehingga menghasilkan produk, adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Pada tahap ini tim akan berkonsultasi dengan mitra terkait siswa sebagai peserta pelatihan ini.
2. Tahap Pelaksanaan Pada tahap ini tim bersama mitra, dan narasumber melaksanakan pelatihan di lokasi kegiatan (sekolah).

3. Tahap Penyelesaian. Pada tahap ini, tim akan menyusun tulisan yang dihasilkan dari kegiatan.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Hasil**

Adapun topik yang dibahas dalam pelaksanaan kegiatan workshop kali ini adalah:

- a) Definisi wawasan nusantara
- b) Kondisi wilayah perbatasan
- c) Geopolitik Perbatasan Indonesia

### **2. Pembahasan**

Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Geo* dan *Politeia*. *Geo* berarti bumi, dan *Politeia* adalah hal yang berkaitan dengan kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (Negara). Sementara dalam bahasa Inggris, *politics* adalah suatu rangkaian prinsip, keadaan, cara, serta alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih lanjut, Geopolitik dalam perkembangannya dipandang sebagai suatu bidang ilmu.

Secara umum, geopolitik yakni mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Frederich Ratzel dengan istilah ilmu bumi politik, dimana dinamika politik suatu negara dipengaruhi oleh keadaan geografis negara tersebut. Geopolitik juga diartikan dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan suatu negara dalam mewujudkan tujuan negara nya didasarkan pada aspek geografis nya. dasar-

dasar tersebut juga menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa itu, atau di Indonesia di kenal dengan istilah wawasan Nusantara.<sup>1</sup>

Secara tradisional, Geopolitik didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh factor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan natar faktor-faktor geografi, strategi dan politik suatu Negara. Adapun dalam implementasinya dibutuhkan suatu strategi yang bersifat nasional. Pandangan seseorang tentang wilayah, letak dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik Negara yang bersangkutan.<sup>2</sup> Pandangan Geopolitik Indonesia serumpun dengan wawasan nusantara.

Wawasan nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) yakni cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat kita hidup, sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di tahun 1998 mendefinisikan bahwa wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup>

Indonesia memiliki perspektif spesifik dalam memandang dinamika geopolitik melalui Wawasan Nusantara yang mengandung pengertian sebagai “cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya

---

<sup>1</sup> Fathurrahman, Dewi Nurvianti, Wilayah Perbatasan Negara (Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional), Jejak Pustaka, Yogyakarta, hlm 53

<sup>2</sup> KEMENRISTEKDIKTI (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (cetakan 1), Dirjen Belmawa, Jakarta, hlm 225-226

<sup>3</sup> Ibid, hlm 212

dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional”. Adapun tujuan nasional yang dimaksud pada konteks itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>4</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, Ketahanan Nasional memerlukan suatu sistem pelaksanaan terintegrasi yang mengacu pada dinamika geopolitik. Sistem terintegrasi itu dapat dituangkan dalam suatu sistem bela negara yang sudah memiliki pijakan hukum kuat pada UUD NRI 1945, serta Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU No.3/2002). Pasal 9 UU No.3/2002 menyebutkan: (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara; (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Memajukan kesejahteraan umum sebagai bagian dari tujuan nasional berdasarkan fakta belum mampu dirasakan secara merata di Indonesia, sebagai contoh pemerataan pembangunan yang belum maksimal bagi daerah-daerah di Indonesia. Merupakan fakta bahwa masyarakat di wilayah perbatasan tertinggal dari aspek ekonomi dibanding masyarakat non perbatasan.

---

<sup>4</sup> Kris Wijoyo Soepandji, Muhammad Farid, Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 3 (2018), hlm 443

Masyarakat perbatasan harus memenuhi kebutuhan keluarga dengan menjadi buruh atau pekerja di Negara tetangga secara ilegal. Ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan dengan negara tetangga disebabkan pemenuhan ekonomi yang belum merata dan berkeadilan di Indonesia, seperti kesempatan kerja atau usaha, ketersediaan pasar dan kelembagaan ekonomi yang minim di perbatasan menjadikan masyarakat di perbatasan memenuhi kebutuhannya melalui sumber-sumber yang berasal dari Negara tetangga.<sup>5</sup>

Fakta bahwa Kondisi kawasan perbatasan Indonesia yang memprihatinkan, jelas terlihat bila dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga. Dari tiga negara yang berbatasan darat dengan Indonesia, Malaysia dianggap lebih maju dalam mengelola kawasan perbatasannya. Beberapa bagian kawasan perbatasan RI-Malaysia menjadi tempat terjadinya kejahatan lintas Negara (transnational crime), khususnya people smuggling dan penyelundupan sumber daya alam. Wilayah yang paling sering menjadi tempat kejahatan tersebut antara lain Entikong-Tebedu, Badau-Lubok Antu, dan Sebatik-Tawau.<sup>6</sup>

Tantangan dan ancaman pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia semakin terlihat di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga. Meskipun dalam konteks akademik belum adanya pendapat yang shahih mengenai konteks kedaulatan negara pada saat hubungan antar negara saat ini saling ketergantungan satu sama lainnya, namun mengingat konsep kedaulatan negara adalah konsep yang yang relational (terbuka) dan bersifat

---

<sup>5</sup> Mita Noveria, Ganewati Wuryandari, John Haba, dkk, 2017, Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan (Perspektif Multidimensi), Buku Obor/LIPI, Jakarta, hlm 15.

<sup>6</sup> Nur Ikfal Raharjo, Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia: Sebuah Catatan, diakses melalui <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/politik-nasional/755-kebijakan-pengelolaan-perbatasan-indonesia-sebuah-catatan.html>

dinamis (tidak statis), maka konsep kedaulatan tidak hanya meliputi wilayah dalam konteks garis imajiner atau batas-batas wilayah dalam angka, melainkan keutuhan wilayah dalam aspek ekonomi, social-budaya, bahkan politik.<sup>7</sup>

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Tentang Wawasan Nusantara (Geopolitik) Bagi Generasi Muda Di Wilayah Perbatasan Sebagai Bagian Dari Bela Negara, tim pelaksana menyimpulkan beberapa hal yakni: *Pertama* Kompleksnya pengetahuan tentang wawasan nusantara dikarenakan tujuan akhir dari cara pandang ini adalah terciptanya persatuan dan kesatuan, *kedua* mendesaknya kebutuhan pemahaman generasi muda berkaitan dengan wawasan nusantara dikarenakan generasi muda lah harapan bangsa yang berperan dalam keutuhan bangsa dan negara di masa akan datang, *ketiga* banyaknya persoalan di kawasan perbatasan yang dapat mempengaruhi pola piker atau cara pandang masyarakatnya khususnya generasi muda, maka negara dituntut hadir untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan yang ada. Dikarenakan pentingnya memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai bangsa dan negara bagi generasi muda, maka pelaksana memberikan saran kepada para pemangku kebijakan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman kepada generasi muda dengan melibatkan seluruh aspek seperti, pemerintah, TNI, Polri dan akademisi.

---

<sup>7</sup> Sigit Riyanto, Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer, Jurnal Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, hlm 12

## **E. Daftar Pustaka**

Fathurrahman, Dewi Nurvianti, Wilayah Perbatasan Negara (Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional), Jejak Pustaka, Yogyakarta;

KEMENRISTEKDIKTI (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (cetakan 1), Dirjen Belmawa, Jakarta;

Kris Wijoyo Soepandji, Muhammad Farid, Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 3 (2018);

Mita Noveria, Ganewati Wuryandari, John Haba, dkk, 2017, Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan (Perspektif Multidimensi), Buku Obor/LIPI, Jakarta;

Nur Ikfal Raharjo, Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia: Sebuah Catatan, diakses melalui <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/politik-nasional/755-kebijakan-pengelolaan-perbatasan-indonesia-sebuah-catatan.html>;

Sigit Riyanto, Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer, Jurnal Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012.